



NOMINAL UMK KOTA YOGYA TERTINGGI **UMP DIY Tahun 2026 Naik 6,78 Persen**

YOGYA (KR) - Pemda DIY secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2026. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama, UMP DIY 2026 mengalami kenaikan 6,78 persen atau bertambah Rp 153.414, sehingga nominalnya menjadi Rp 2.417.495.

Kenaikan tersebut akan menjadi acuan awal dalam penetapan gaji minimum di kabupaten/kota. Sebab, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY akan mengalami kenaikan, dengan persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Kulonprogo dengan persentase 6,52 persen.

"Pemda DIY menetapkan UMP DIY 2026 mencapai Rp 2.417.495. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang nominalnya Rp 2.264.080,95. Penetapan UMK 2026 dilakukan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi bupati dan walikota, yang sebelumnya diusulkan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni



KR-Riyana Ekawati

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat mengumumkan besaran UMP DIY tahun 2026 di Gedhong Pracimasana Kompleks Kematihan.

Made Dwipati Indrayanti di Gedhong Pracimasana Kompleks Kematihan, Rabu (24/12).

Ni Made mengatakan, UMK 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Meski Kenaikan UMK Kulonprogo mencapai 6,52 persen atau menjadi Rp 2.504.520, tetapi UMK Kota Yogyakarta tetap menjadi yang tertinggi secara nomi-

nal di DIY setelah naik 6,50 persen menjadi Rp 2.827.593. Sedangkan UMK Sleman mengalami kenaikan 6,40 persen dengan nominal Rp 2.624.387, UMK Bantul naik 6,29 persen menjadi Rp 2.509.001, dan UMK Gunungkidul naik 5,93 persen menjadi Rp 2.468.378.

"Kenaikan UMP dan UMK DIY 2026 diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan keberlanjutan sektor industri dan jasa," ungkapnya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur

akademisi, Priyonggo Suseno menuturkan penetapan kenaikan UMP 2026 menggunakan alfa 0,8. Dari situ hasil kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha dengan rekomendasi akademisi.

"Angka alfa 0,8 itu berarti sekitar 80 persen pertumbuhan ekonomi dibagikan kepada pekerja. Ini cenderung ke batas atas dari rentang yang ditetapkan pemerintah pusat," ungkapnya.

Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi DIY tahun ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi terutama karena ditopang sektor konstruksi dan pertambangan yang banyak didorong proyek strategis nasional. Namun, sifat pertumbuhan tersebut dinilai situatif dan belum tentu berkelanjutan.

"Oleh karena itu, Pemda memutuskan untuk fokus mengawal UMP tanpa menetapkan UMSP. Harapannya, kebijakan tersebut bisa menjadi dorongan bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja," jelasnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005